

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*Good Governance*). Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Muara tuntutan ini pada intinya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sebagai pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas.

Dari 7 (tujuh) azas-azas umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga setiap penyelenggara Negara wajib untuk menyajikan laporan akuntabilitas kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun.

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi adalah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi.

c. Fungsi.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi adlaah sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 ASPEK STRATEGIS

Berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, penetapan prioritas dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut:

a. Misi 1 : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

b. Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan melalui optimalisasi sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

c. Sasaran 1: Menurunnya tingkat pengangguran dengan indikator sasaran, sebagai berikut:

1. Angka partisipasi angkatan kerja (lintas SKPD);
2. Angka sengketa pengusaha – pekerja pertahun;
3. Tingkat partisipasi angkatan kerja;
4. Pencari kerja yang ditempatkan;

5. Tingkat pengangguran terbuka (lintas SKPD);
 6. Keselamatan dan perlindungan;
 7. Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah;
 8. Transmigrasi swakarsa.
- d. Sasaran 2: Meningkatnya jaminan dan perlindungan social kemasyarakatan dengan indicator sasaran sebagai berikut:
1. Sarana social seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi;
 2. PMKS yang memperoleh bantuan social;
 3. Penanganan PMKS.

Penetapan strategi dan kebijakan

Dalam mewujudkan tujuan dan mencapai sasaran, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan sasaran strategis, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Sarana dan prasarana penanganan PMKS dengan memberikan Pelatihan ketrampilan dan bantuan social bagi korban bencana, Gakin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), orang jompo, orang terlantar, penyandang cacat, penghuni eks lokalisasi dan orang gila gelandangan;
2. Mengoptimalkan potensi sumberdaya kesejahteraan social dengan jalan memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi TAGANA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) PKH dan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM) sehingga dapat meningkatkan penanganan dan pelayanan bagi PMKS;
3. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan dengan jalan mengadakan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan sebagai wujud pelaksanaan kegiatan;
4. Meningkatnya pemberian bantuan permakanan bagi penghuni panti social, Lembaga Kesejahteraan social anak (LKSA) yang ada di Kabupaten Banyuwangi.
5. Memperluas lapangan kerja dan penanganan pengangguran melalui penempatan sector formal dan informal dengan jalan menyebarluaskan informasi/ bursa lowongan pekerjaan kepada pencari kerja dan melatih agar menjadi pencari kerja yang mempunyai daya saing serta dengan mengadakan kegiatan Banyuwangi Job Fair 2014.
6. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas kerja dengan cara meningkatkan kualitas pelatihan pada lembaga;
7. Menciptakan hubungan industrial yang harmonis dan produktif serta menciptakan ketenangan kerja usaha, dengan terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui pengaturan syarat-syarat kerja yang menjamin kepastian hak dan kewajiban.
8. Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja dengan meningkatkan pelaksanaan system Manajemen Keselamatan dan Kesehatan kerja (K3) di perusahaan;
9. Mewujudkan kerjasama antar daerah bidang Ketransmigrasian dengan cara meningkatkan jalinan kerjasama antar daerah, antar sektor, pelaku dalam bidang transmigrasi;

10. Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi dengan jalan memberangkatkan para calon transmigran ke daerah yang sudah disepakati dalam kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi.

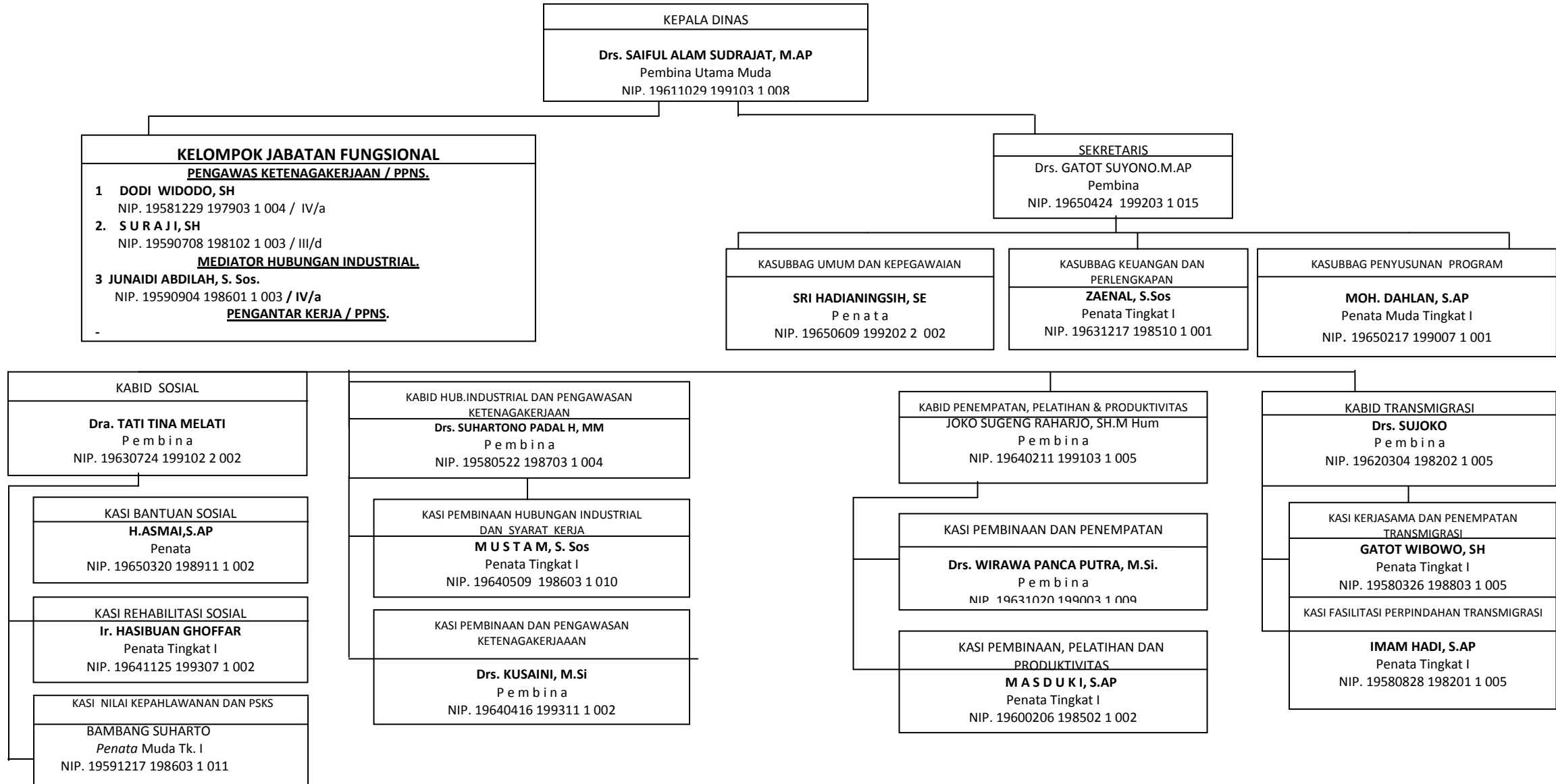
2 STRUKTUR ORGANISASI

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, struktur Dinas dikepalai oleh Kepala Dinas yang membawahi:

1. Sekretariat, yang membawahi: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan dan Sub Bagian Penyusunan Program;
2. Bidang Sosial yang membawahi: Seksi Bantuan Sosial, Seksi Rehabilitasi Sosial dan Seksi Nilai Kepahlawanan dan PSKS;
3. Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, yang membawahi: Seksi Pembinaan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja, Seksi Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan.
4. Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas, yang membawahi: Seksi Pembinaan dan Penempatan, Seksi Pembinaan, Pelatihan dan Produktivitas.
5. Bidang Transmigrasi, yang membawahi: Seksi Kerjasama dan Penempatan Transmigrasi, Seksi Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
6. Kelompok jabatan fungsional.

Struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi selengkapnya diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut ini

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI



SISTEMATIKA PENYAJIAN.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi selama Tahun 2014. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2014 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2013 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Adapun sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

1. **Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi serta struktur organisasi;
2. **Bab II – Perencanaan dan Penetapan Kinerja**, menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 meliputi RPJMD 2010-2015, Rencana Strategis Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 - 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2014;
3. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja Tahun 2014**, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2014;
4. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana disebutkan bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan tata Kerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi diberikan tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada :

- 1) RPJMD 2010-2015;
- 2) Renstra Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2010-2015;
- 3) Penetapan Kinerja Tahun 2014.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, yang harus dipegang teguh dan diupayakan dapat terwujud. Masyarakat makmur adalah masyarakat yang sejahtera, yang berkecukupan atau tidak kekurangan, yang tidak saja berdimensi fisik atau materi, tetapi juga rohani sesuai dengan cita-cita otonomi daerah.

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang berkeadilan, bermartabat, dan terpenuhi hak-hak dasarnya, bebas mengemukakan pikiran dan pendapat, bebas dari ketakutan dan belenggu diskriminasi, bebas dari penindasan, dengan sumber daya manusia yang berkualitas secara fisik, psikis maupun intelektualitas.

Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran, sebagai berikut:

2.1.1 V i s i

VISI adalah rumusan umum mengenai pandangan ke depan, kemana dan bagaimana instansi harus dibawa dan bekerja agar tetap konsisten, eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Pendapat lain mengatakan bahwa visi adalah merupakan suatu gambaran yang menaentang keadaan masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh instansi Pemerintah.

Adapun visi Dinas Sosial, tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah :
"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT DENGAN TERSEDIANNYA TENAGA KERJA YANG BERKUALITAS DAN LAPANGAN KERJA SERTA PERSEBARAN PENDUDUKAN YANG MERATA MELALUI TRANSMIGRASI".

2.1.2 Misi

MISI merupakan pernyataan secara luas dan komprehensif tentang tujuan instansi yang diekspresikan dalam produk dan pelayanan yang akan diberikan atau dilaksanakan, kebutuhan masyarakat yang dapat dipenuhi, kelompok masyarakat yang dilayani, serta nilai-nilai yang dapat diperoleh. Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.

Untuk mencapai Visi tersebut maka dijabarkan kedalam Misi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yaitu sebagai berikut :

- Meningkatkan Sarana dan Prasarana penanganan PMKS
- Mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial
- Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana, keluarga miskin, orang jompo, orang terlantar.
- Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
- Mengembangkan usaha mandiri
- Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.
- Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.
- Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.
- Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.

2.1.3 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sebagai upaya untuk mewujudkan misi yang ingin dicapai, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi menetapkan tujuan yang jelas ingin dicapai, berikut di lampirkan Matrik keterkaitan antara Misi dan tujuan, antara lain:

**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI
STEMATIKA LAPORAN KA KINERJA PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2014**

VISI *“ Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan tersediannya tenaga kerja yang berkualitas dan lapangan kerja serta persebaran pendudukan yang merata melalui Transmigrasi ”.*

MISI 1 Meningkatkan Sarana dan Prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Tujuan Terwujudnya pelayanan dan fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penangan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Terwujudnya pelayanan dan fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Memberikan Pelatihan ketrampilan dan bantuan social bagi korban bencana, Gakin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), orang jompo, orang terlantar, penyandang cacat, penghuni eks lokalisasi dan orang gila gelandangan;
Mengoptimalkan potensi sumberdaya kesejahteraan sosial	Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan meningkatkan SDM dalam Penanganan PMKS	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi TAGANA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) PKH dan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM)
Meningkatkan sarana dan Prasarana Panti Asuhan	Meningkatnya pemberian bantuan permakanaan bagi penghuni panti sosial, Lembaga Kesejahteraan social anak (LKSA)	Peningkatan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan sehari -hari bagi penghuni panti
Melestarikan Nilai - nilai Kepahlawanan	Memberikan rasa nyaman bagi peziarah pada Taman Makam Pahlawan	Terciptanya pemeliharaan TMP

VISI *“Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan tersediannya tenaga kerja yang berkualitas dan lapangan kerja serta persebaran pendudukan yang merata melalui transmigrasi ”.*

MISI 1 Memperluas lapangan kerja dan penanganan pengangguran melalui penempatan sector formal dan informal, serta peningkatan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja

Tujuan Terciptanya informasi bursa kerja dan lowongan pekerjaan di perusahaan bagi pencari kerja

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
Memperluas lapangan kerja dan penanganan pengangguran melalui penempatan sector formal dan informal	Terciptanya informasi bursa kerja dan lowongan pekerjaan di perusahaan bagi pencari kerja	Penyebarluasan Informasi bursa lowongan pekerjaan bagi pencari kerja
Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitan tenaga kerja	Terciptanya pencari kerja berkualitas sesuai dengan harapan pasar kerja	Peningkatan kualitas pelatihan pada lembaga

MISI 2 Menciptakan hubungan industri yang efektif dan harmonis serta menciptakan ketenangan kerja usaha

Tujuan Terciptanya informasi bursa kerja dan lowongan pekerjaan di perusahaan bagi pencari kerja

Menciptakan hubungan industri yang efektif dan harmonis serta menciptakan ketenangan kerja usaha	Terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui pengaturan syarat-syarat kerja yang menjamin kepastian hak dan kewajiban	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/ buruh
--	--	---

MISI 3 Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan

Tujuan Terciptanya peningkatan pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Perusahaan

Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan	Terciptanya peningkatan pelaksanaan sistem Manajemen Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Perusahaan	Peningkatan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
---	---	---

**DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI
SISTEMATIKA LAPORAN KA KINERJA PEMERINTAH (LAKIP)
TAHUN 2014**

VISI " *Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat dengan tersediannya tenaga kerja yang berkualitas dan lapangan kerja serta persebaran penduduk yang merata melalui transmigrasi* ".

MISI 1 Mewujudkan kerja sama antar daerah di bidang Transmigrasi.

Tujuan Terjalannya kerjasama antar daerah pada bidang transmigrasi (luar jawa).

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
Mewujudkan kerjasama antar daerah dibidang ketransmigrasian	Terjalannya kerjasama antar daerah, antar sektor, pelaku dalam bidang Kertransmigrasian	Terwujudnya Program Pengembangan wilayah Transmigrasi

MISI 2 Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi

Tujuan Terlaksananya pemberangkatan dan penempatan para calon transmigran yang sudah disepakati dalam kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi

Misi	Tujuan	Indikator Kinerja
Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi	Terlaksananya pemberangkatan dan penempatan para calon transmigran yang sudah disepakati dalam kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi	Pemberangkatan dan penempatan para transmigran ke daerah tujuan

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang telah ditetapkan sebagai rumusan untuk mencapai tujuan, berikut Matrik kererkaitan antara Tujuan dan Sasaran:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terwujudnya pelayanan dan fasilitasi penanganan penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS)	Terlayannya dan terfasilitasinya Penanganan PMKS	Memberikan Pelatihan ketrampilan dan bantuan social bagi korban bencana, Gakin, Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), orang jompo, orang terlantar, penyandang cacat, penghuni eks lokalisasi dan orang gila gelandangan;
Terlaksananya pelatihan keterampilan bagi Mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan meningkatkan SDM dalam Penanganan PMKS	Pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan bagi Mitra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan SDM bagi TAGANA, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Petugas Sosial Masyarakat (PSM) PKH dan Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM)
Meningkatnya pemberian bantuan permakanaan bagi penghuni panti sosial, Lembaga Kesejahteraan social anak (LKSA)	Terpenuhinya kebutuhan pokok berupa permakanaan bagi penghuni panti Sosial dan Lembaga kesejahteraan social Anak (LKSA)	Peningkatan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan sehari -hari bagi penghuni panti
Memberikan rasa nyaman bagi peziarah pada Taman Makam Pahlawan	Terciptanya kebersihan dan penataan Taman Makam Pahlawan	Terciptanya pemeliharaan TMP
Terciptanya informasi bursa kerja dan lowongan pekerjaan di perusahaan bagi pencari kerja	Pencari kerja Produktif yang akan bekerja pada sector formal	Penyebarluasan Informasi bursa lowongan pekerjaan bagi pencari kerja
Terciptanya pencari kerja berkualitas sesuai dengan harapan pasar kerja	Pencari kerja produktif yang mampu dan siap bersaing dengan pencari kerja dari Negara Lain	Peningkatan kualitas pelatihan pada lembaga
Terwujudnya kesejahteraan pekerja melalui pengaturan syarat-syarat kerja yang menjamin kepastian hak dan kewajiban	Terwujudnya pelaksanaan hak dan kewajiban di tempat kerja yang mendukung kelangsungan usaha dan kelangsungan bekerja untuk menjamin kesejahteraan pekrja dan keluarganya.	Peningkatan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha dan pekerja/ buruh
Terciptanya peningkatan pelaksanaan syistem Manajemen Keselamatan dan kersehatan kerja (K3) di Perusahaan	Terciptanya tempat kerja yang aman sesuai dengan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja	Peningkatan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaan
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Terjalannya kerjasama antar daerah, antar sektor, pelaku dalam bidang Kertransmigrasian	Terlaksananya kerjasama dan evaluasi denga 5 (lima) Kabupaten daerah tujuan.	Terwujudnya Program Pengembangan wilayah Transmigrasi
Terlaksananya pemberangkatan dan penempatan para calon transmigran yang sudah disepakati dalam kerjasama pengembangan kawasan transmigrasi	Diberangkatkannya transmigran sebanyak 20 KK pada program transmigrasi Umum dan Transmigrasi Swakarsa mandiri	Pemberanghkatan dan penempatan para transmigran ke daerah tujuan

2.1.5 Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan dan dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

- a. Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b. Mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial
- c. Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial
- d. Peningkatan bantuan sosial bagi korban bencana, keluarga miskin, orang jompo, orang terlantar/pemulangan Penyandang cacat dan anak putus sekolah.
- e. Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.
- f. Mengembangkan usaha mandiri
- g. Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.
- h. Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- i. Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.
- j. Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.
- k. Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.
- l. Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.

2.1.6 Program dan Kegiatan

Program adalah rancangan suatu azas yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai. Program yang ditetapkan hendaknya benar-benar mencerminkan kondisi riil dan tepat sasaran terhadap apa yang akan dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai program yang dilaksanakan, sebagai berikut:

2.1.6.1 Uraian Program dan Kegiatan Tahun 2014

No.	Program	Kegiatan	Target Capaian
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik	100%
		3 Penyediaan Jasa Perkantoran	100%
		4 Penyediaan Alat Tulis Kantor	100%
		5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%
		6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan	100%
		7 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15 unit
		8 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100%
		9 Penyediaan bahan bacaan dan bahan Perundang-undangan	344 unit
		10 Penyediaan Bahan Logistik kantor	100%
		11 Penyediaan Makanan dan Minuman	3479 ktk
		12 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	100%
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pengadaan Mebeleur	6 unit
		2 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	1 Unit
		3 Pemeliharaan rutin /berkala Kendaraan Dinas/Operasional	1 paket
		4 Pemeliharaan rutin /berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 paket
		5 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	1 paket
3	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Pemberdayaan Fakir	1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Paket
4	Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS	1 Peningkatan Kemampuan Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	
		- Penanganan Orgil, Gepeng hasil razia	1 paket
		- Pelatihan Keterampilan bagi eks Narapidana	10 orang
		2 Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin	
		- Fasilitasi Pelaksanaan rakor dan Bintek Tim pelaksana PKH	65 orang
5	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3 Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	
		- Peproduktiflatihan keterampilan usaha beternak kambing bagi wanita rawan sosial Ekonomi (WRSE) dan Lansia Produktif	50 orang
		1 Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
		- Sosialisasi tentang Rehabilitasi Berbasis Masyarakat Cluring	50 orang
		2 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat dan anak nakal	100%
5	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan	- Pelatihan menyablun bagi anak Jalanan (Putus sekolah)	15 orang
		3 Penanganan masalah-masalah Strategis yang menyangkut tanggap,cepat Darurat dan kejadian Luar Biasa	
		- Peningkatan Kesejahteraan dan Pemantapan Anggota TAGANA	39 orang
		- Pemulangan orang terlantar (kehabisan bekal, kehilangan dan kecopetan) sampai ke tempat tujuan	100 orang
		1 Diklat bagi Penyandang cacat dan Eks Trauma	
5	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan	- Pelatihan menyablun bagi penderita cacat dan eks Trauma	15 orang
		2 Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks trauma	
6	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo	- Pengiriman pelatihan Keterampilan cacat yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi	25 orang
		1 Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/jompo	46 lbg
		- Pembinaan dan Pemberdayaan Lansia 6 Desa di kecamatan Kalibaru	60 orang
		- Pelatihan Keterampilan bagi Penghuni panti Sosial dan orang-orang Lansia di kec. Glenmore	25 orang
6	Pembinaan Panti Asuhan/ Panti jompo	2 Bantuan Permakanan Bagi penghuni Panti	

			- Pemberian Permakanan pada panti Asuhan di Banayuwangi	50 panti
			- Bantuan permakanan bagi penghuni YKPTI banyuwangi	1 panti
7	Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya)	1	Diklat Ketrampilan Berusaha bagi eks PPS	25 orang
			- Pelatihan bagi eks penghuni lokalisasi	40 orang
		2	Monitoring Evaluasi dan pelap[oran - Pemantauan kemajuan perubahan kondisi lokalisasi di Kabupaten Banyuwangi	11 lokasi
8	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat - Pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan bagipeserta penyandang PMKS	20 orang
			- Fasilitasi Manajemen kualitas SDM bagi TKSK	24 orang
9	Pengelolaan Areal Pemakaaman	1	Pemeliharaan TMP Wisma Raga Satria dan BOOM	2 lokasi
10	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja - Pelatihan berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Otomotif	20 orang
11	Peningkatan Kesempatan Kerja	1	Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja - Fasilitasi Bursa Kerja Khusus(BKK) dan Bursa Kerja Pemerintah (BKP)	100 orang
		2	Penyebarluasana informasi Bursa Tenaga Kerja - Kegiatan Job Market Fair (Bursa Kerja Terbuka) - Kegiatan Forum Diaspora Banyuwangi - Kegiatan Pendataan Pencari Kerja	1 Paket 1 Paket 20 Buku
12	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1	Fasilitasi Penyelesaian prosedur , Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	1 paket
		2	Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jamsostek - Penetapan Usulan UMK	1 paket%
		3	Sosialisasi Berbagai Peraturan Pelaksanaan ttg Ketenagakerjaan - Sosialisasi Penetapan dan Penerapan UMK - Fasilitasi Penempatan TKI	100 persh 1 paket
		4	Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakan Hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja - Penguatan dan Pembentukan SMK3 (Sistem Manajemen K3)	40 Persh
		5	Pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, Dialogis, Adil dan Bermartabat serta Perbaikan Upah, Syarat kerja dan Kesejahteraan Pekerja/Buruh - Pembinaan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial (PP,PKB,LKS Bipartit dan Jamsostek)	
		6	Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing - Penanganan Permasalahan dan Penempatan TKI	1 Paket
13	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	1	Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan anatr sektor dalam rangka pengembangan Kawasan Transmigrasi	6 lokasi
		2	Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM	40 KK
14	Transmigrasi Lokal	1	Pelatihan Transmigrasi Lokal (Pengolahan Hasil Pertanian)	40 orang
15	Transmigrasi Regional	1	Pelatihan transmigrasi Regional	40 orang

2.2 Perjanjian / Penetapan Kinerja 2015

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempersentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penrima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur ;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur ;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian kinerja Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupten Banyuwangi tahun 2014 sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Sarana dan prasarana Penanganan PMKS
Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sbb :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Caapaian
Meningkatnya Sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Memberikan bimbingan dan bantuan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), orang jompo, orang terlantar, penyandang cacat, penghuni eks lokalisasi, dan orang gila gelandangan	855 orang	593 orang	70%

Sasaran Strategis 2 : Mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Caapaian
Mengoptimalkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi TKSK, TAGANA, PKH dan RBM	172 orang	172 orang	100%

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Caapaian
Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.	Memelihara TMP	2 lokasi	2 lokasi	100%

Sasaran strategis 4 : Meningkatnya sarana dan prasana panti asuhan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Caapaian
Meningkatnya sarana dan prasana panti asuhan	Peningkatan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan sehari-hari bagi penghuni panti	51 panti	51 panti	100%

Sasaran strategis 5: Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	capaian
Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.	Menyebarkan informasi/ bursa lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja	100 orang	100 orang	100%

Sasaran strategis 6: Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.	Meningkatkan kualitas pelatihan pada lembaga	60 orang	60 orang	100%

Sasaran 7: Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.	Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis dalam iklim kerja yang kondusif di Perusahaan	80%	80%	100%

Sasaran strategis 8: Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.	Meningkatkan pelaksanaan K3 di perusahaan yang ada	40Perusah	40 perusahaan	100%

Sasaran strategis 9: Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.	Meningkatkan jalinan kerjasama antar daerah dalam bidang transmigrasi	6 Lokasi	6 Lokasi	100%

Sasaran Strategis 10: Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.	Memberangkatkan calon transmigran	70 KK	70 KK	100%

Sasaran 11: Melaksanakan Transmigrasi Lokal.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Melaksanakan transmigrasi Lokal	Memberikan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Exodan dan eks Transmigran	40 orang	40 orang	100%

Sasaran 12: Melaksanakan Transmigrasi Regional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Melaksanakan transmigrasi Regional	Memberikan Pelatihan ternak unggas bagi Exodan dan eks Transmigran	40 orang	40 orang	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2013 dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial. Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tahun 2014 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sbb :

Sasaran Strategis 1 : Meningkatkan Sarana dan prasarana penanganan PMKS

Pencapaian target kinerja atas sasaran ini adalah sbb :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Sarana dan prasarana penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Memberikan bimbingan dan bantuan ketrampilan bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), orang jompo, orang terlantar, penyandang cacat, penghuni eks lokalisasi, dan orang gila gelandangan	855 orang	593 orang	70%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam upaya meningkatkan sarana dan prasarana penanganan PMKS meliputi kegiatan wanita rawan social ekonomi pada tahun 2014 ditargetkan sebanyak 50 orang, lansia terlantar produktif 85 orang, pemulangan orang terlantar 144, penyandang cacat 30 orang, Lokalisasi 30 orang, Putus sekolah 15 anak, orang gila gelandangan 225 orang dan pengiriman pelatihan PMKS ke UPT PMKS Provinsi 14 orang. Kegiatan yang dilakukan berupa pemberian pelatihan dan bantuan usaha berupa ternak kambing kepada 50 orang yang dimaksudkan dapat meningkatkan pengetahuan berupa ketrampilan memelihara ternak kambing sehingga pendapatan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kerajinan tangan pada Lansia Produktif sebanyak 85 orang, memfasilitasi pemulangan orang terlantar ke daerah asal sebanyak 144 orang, memberikan pelatihan dan bantuan peralatan keterampilan bagi penyandang cacat sejumlah 15 orang serta memfasilitasi pengiriman pelatihan ke UPT Provinsi sejumlah 15 orang, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kepada Masyarakat terdampak penutupan Lokalisasi sejumlah 30 orang, memberikan pelatihan keterampilan dan bantuan peralatan kepada 15 anak putus sekolah, Tertanganinya orgil gelandangan hasil razia sejumlah 225 orang dan pengiriman pelatihan ke UPT PMKS Provinsi 14 orang .

2. Sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2014 sejumlah 855 orang, sedang yang terealisasi 593 orang artinya bahwa kinerja kegiatan yang dilakukan untuk mengupayakan peningkatan bagi PMKS output 80% dibandingkan dengan tahun 2013 sasaran yang direalisasi 340 orang . Sedangkan untuk tahun 2015 kita berupaya untuk lebih meningkatkan kinerja dengan lebih banyak output yang dihasilkan guna mengentaskan kemiskinan utamanya bagi PMKS.

Sasaran Strategis 2 : Mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Mengoptimalkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Memberikan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM bagi TKSK, TAGANA, PKH dan RBM	172 orang	172 orang	100%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan:

1. Dari sasaran strategis yang ingin diasumsikan yaitu mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan social perlu dibuat indicator kinerja agar sasaran yang ingin dicapai dapat diraih dengan meberikan pelatihan bagi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) 24 orang, Tagana 39 orang, PKH 59 orang Rehabilitasi berbasis Masyarakat (RBM) 50 orang.
2. Target sasaran pada Tahun 2014 sebanyak 172 orang sedangkan pada Tahun 2013 PSKS yang mendapat bimbingan peningkatan SDM sebanyak 144 orang.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatkan pembinaan dan rehabilitasi sosial

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.	Memelihara TMP	2 lokasi	2 lokasi	100%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan bahwa dari target yang ditentukan outputnya diselesaikan sebanyak 2 lokasi yaitu TMP WISMA RAGA SATRIA dan TMP BOOM (100%), artinya bahwa menunjukkan kinerja baik karena telah diselesaikan secara keseluruhan kegiatan pada tahun 2014 ini.

Sasaran strategis 4 : Meningkatkan sarana dan prasana panti asuhan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatnya sarana dan prasana panti asuhan	Peningkatan kebutuhan nutrisi dan kebutuhan sehari-hari bagi penghuni panti	51 panti	51 panti	100%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan :

1. Terfasilitasinya kebutuhan peningkatan gizi dan kebutuhan se hari-hari bagi penghuni panti se Kabupaten Banyuwangi sebanyak 51 panti asuhan.
Dari target yang ditentukan sebanyak 51Panti, terealisasi sebanyak 51 panti (100%), artinya menunjukkan kinerja sangatlah baik terhadap kegiatan yang dilakukan pada tahun 2014 ini. Sedangkan pada Tahun 2013 yang mendapat bantuan sebanyak 46 panti

Sasaran strategis 5: Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.	Menyebarkan informasi/ bursa lowongan pekerjaan kepada Pencari Kerja	100 orang	100 orang	100%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan bahwa dari target sebesar 100% yang ditentukan terealisasi 100%, artinya bahwa menunjukkan kinerja baik dalam menyebarkan informasi bursa kerja yang dilakukan baik melalui media massa, media elektronik (siaran radio). Outcome yang diharapkan adalah para pencari kerja dapat mendapatkan secara dini/cepat akan adanya lapangan kesempatan kerja perusahaan yang membutuhkan.

Sasaran strategis 6: Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Meningkatkan kualitas pelatihan dan produktivitas tenaga kerja.	Meningkatkan kualitas pelatihan pada lembaga	60 orang	60 orang	100%

Perkembangan realisasi target dapat dijelaskan sebagai berikut:

Dari target yang ditentukan terealisasi 60 orang, artinya bahwa kinerja untuk kegiatan ini menunjukkan hasil yang signifikan dengan kegiatan yang dilakukan. Dengan mengandalkan pada upaya memberikan peningkatan kualitas pelatihan bagi pencari kerja yang optimal dan dapat dijadikan akses untuk mendapatkan pekerjaan yang diharapkan sesuai dengan regulasi yang ada.

Pelatihan yang diadakan adalah pelatihan berbasis kompetensi bidang perbengkelan Otomotif sebanyak 20 orang, pelatihan berbasis kompetensi bidang perbengkelan Las sebanyak 20 orang, peningkatan kualitas berbahasa asing (Korea) yang ditujukan bagi para pencari kerja yang ingin keluar negeri sehingga mempunyai daya saing yang kompetitif sebanyak 20 orang. Untuk tahun yang akan datang direncanakan akan diadakan pelatihan dengan mempertimbangkan kebutuhan yang diinginkan dengan melibatkan Lembaga yang berkompeten dalam menangani bahasa asing.

Sasaran 7: Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.	Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis dalam iklim kerja yang kondusif di Perusahaan	80%	80%	100%

Perkembangan realisasi dari target dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengembangan hubungan industrial yang harmonis, dialogis, adil dan bermartabat serta perbaikan upah, syarat kerja dan kesejahteraan pekerja/ buruh yang dilakukan efektif mengatasi bentuk permasalahan yang ada di perusahaan sehingga terjalin hubungan yang harmonis antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini menunjukkan kinerja baik (100%), artinya output yang dihasilkan selaras dengan kegiatan yang dilakukan.
2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan yang dilakukan mempunyai dampak yang signifikan dengan output yang dihasilkan yaitu 100% dilaksanakan pada perusahaan yang ada di Banyuwangi.
3. Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari:
 - Penetapan penerapan upah minimum kabupaten (UMK) berhasil dilaksanakan oleh lembaga terkait: Tripartit, Dewan Pengupahan yang intinya mengakomodir kebutuhan pekerja dengan mempertimbangkan azas keadilan dan kemampuan perusahaan.
 - Pembentukan lembaga kerjasama BIPARTIT di perusahaan yang ditargetkan kepada 50 perusahaan, telah berjalan dengan baik, hal ini terlihat pada hasil kinerja yang di prosentasikan mencapai 70 % karena telah dilaksanakan kepada 30 perusahaan. Outcome yang akan didapatkan diharapkan bahwa keharmonisan hubungan industrial dapat terjaga dan terpelihara dengan menjunjung tinggi rasa keadilan berjalan kondusif, dialogis dan bermartabat.
4. Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel. Dari target 20 kasus yang dilaporkan keseluruhan telah diselesaikan (100%)

Sasaran strategis 8: Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.	Meningkatkan pelaksanaan K3 di perusahaan yang ada	40 Perush	40 perush	100%

Perkembangan realisasi dari target dapat dijelaskan bahwa kegiatan peningkatan pelaksanaan K3 dari target kepada 40 perusahaan direalisasikan 40 perusahaan (100%), artinya bahwa menunjukkan kinerja yang baik. Untuk tahun mendatang akan dilakukan penguatan kelembagaan dan pengawasan yang lebih intensif dan koordinatif sehingga hasilnya jauh lebih berhasil dan berdayaguna.

Sasaran strategis 9: Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.	Meningkatkan jalinan kerjasama antar daerah dalam bidang transmigrasi	6 Lokasi	6 Lokasi	100%

Perkembangan realisasi dari target dapat dijelaskan bahwa:

1. Dalam upaya untuk mencapai sasaran yang sudah ditentukan, maka kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan kerjasama yang intensif dengan para pelaku (Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah setempat) untuk mengembangkan daerah wilayah transmigrasi. Pada tahun 2014 dari target 6 lokasi telah tercover seluruhnya (100%), hal ini menunjukkan bahwa kinerja sangat baik secara signifikan dengan kegiatan yang ada.
2. Transmigrasi adalah upaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan cara memindahkan ke tempat lain yang dijamin oleh pemerintah kehidupannya sesuai dengan peraturan dalam bidang ketransmigrasian. Harapan pada tahun 2014 akan direncanakan pengembangan wilayah transmigrasi pada 5 lokasi tujuan yaitu:
 - Kabupaten Muna (Prov. Sulawesi Tenggara);
 - Kabupaten Gorontalo, (Prov. Gorontalo);
 - Kabupaten Pohuwoto, (Prov. Gorontalo);
 - Kabupaten Boalemo (Prov. Gorontalo)
 - Kabupaten Donggala (Prov. Sulawesi Tengah)

Sasaran 10: Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.	Memberangkatkan calon transmigran	70 KK	70 KK	100%

Perkembangan realisasi dari target dapat dijelaskan bahwa:

1. Dari target yang telah ditetapkan pada kegiatan Pengerahan, pemberangkatan transmigran ke daerah tujuan sebanyak 40 KK, (100%), artinya bahwa menunjukkan *performance* (kinerja) sangat baik dan secara signifikan telah berpengaruh dengan kegiatan yang ada (*holding another constans*).

Sasaran 11: Melaksanakan Transmigrasi Lokal.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melaksanakan transmigrasi Lokal	Memberikan Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian bagi Exodan dan eks Transmigran	40 orang	40 orang	100%

Dari target yang telah ditetapkan pada kegiatan Pelatihan transmigrasi Lokal sebanyak 40 orang, (100%), artinya bahwa menunjukkan *performance* (kinerja) sangat baik dan secara signifikan telah berpengaruh dengan kegiatan yang ada

2. Sedangkan pada tahun 2014, Kabupaten Banyuwangi mendapatkan penghargaan Transmigration Award 2014 Daerah asal, yang penghargaannya diserahkan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Bupati Banyuwangi Pada tanggal 15 desember 2014 di Jakarta. Dan memberangkatkan sebanyak 20 KK dimana kegiatan ini mempunyai kontribusi atau berdampak langsung/ *instan* akan mengurangi angka kemiskinan yang ada di Banyuwangi.

Untuk Tahun 2015 direncanakan sebanyak 40 orang akan diikuti dalam pelatihan Transmigrasi lokal.

Sasaran 12: Melaksanakan Transmigrasi Regional.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
Melaksanakan transmigrasi Regional	Memberikan Pelatihan ternak unggas bagi Exodan dan eks Transmigran	40 orang	40 orang	100%

Dari target yang telah ditetapkan pada kegiatan Pelatihan transmigrasi Regional sebanyak 40 orang, (100%), artinya bahwa menunjukkan *performance* (kinerja) sangat baik dan secara signifikan telah berpengaruh dengan kegiatan yang ada. Sedangkan untuk kegiatan Penyuluhan Transmigrasi Lokal Tahun 2015 direncanakan sebanyak 150 orang.

Program/ Kegiatan	Pagu	Realisasi	(%)
1	2	3	4
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	1,998,000	99.90
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	60,000,000	29,997,775	50.00
Penyediaan Jasa Perkantoran	36,000,000	36,000,000	100.00
Penyediaan Alat Tulis Kantor	40,000,000	39,998,100	100.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	45,000,000	44,532,540	98.96
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	12,000,000	11,997,600	99.98
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	81,268,000	64,950,000	79.92
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	40,000,000	39,999,550	100.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	70,000,000	69,980,125	99.97
Penyediaan Makanan dan Minuman	41,000,000	40,984,000	99.96
Rapat - rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	235,000,000	234,305,126	99.70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
Pengadaan Mebeleur	27,732,000	27,649,000	99.70
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	90,000,000	89,995,400	99.99
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional	70,000,000	65,704,400	93.86
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23,000,000	22,900,000	99.57
Rehabilitasi sedang/berat gedung Kantor	72,750,000	72,750,000	100.00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45,000,000	44,487,150	98.86
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya.			
Kegiatan Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya.			
Sub Kegiatan Penanganan Orang Gila, Gepeng hasil razia.	40,000,000	22,722,135	56.81
Sub Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Eks Narapidana	40,000,000	31,400,000	78.50
Kegiatan Fasilitasi Manajemen Usaha bagi Keluarga Miskin ➤ Sub kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Rakor dan Bintek Tim Pelaksana PKH	75,000,000	66,175,000	8.23
Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial ➤ Sub kegiatan Pelatihan Ketrampilan Usaha Beternak Kambing bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan Lansia Produktif.	20,000,000	16,785,000	83.93

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). ➤ Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Rehabilitasi Berbasis Masyarakat - Cluring.	20,000,000	20,000,000	100.00
Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal. ➤ Sub Kegiatan Pelatihan Menyablun bagi Anak Jalanan (Putus Sekolah).	50,000,000	48,335,450	96.67
Kegiatan Penanganan Masalah - masalah Strategis yang menyangkut Tanggap, Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa			
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan dan Pemantapan TAGANA.	100,000,000	97,725,420	97.73
➤ Sub Kegiatan Pemulangan Orang Terlantar (kehabisan bekal, kehilangan dan kecopetan) sampai ke tempat tujuan.	50,000,000	29,990,900	59.98
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma			
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma ➤ Sub Kegiatan Pelatihan Menyablun bagi Penderita Cacat dan Eks Trauma	50,000,000	45,476,450	90.95
Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma ➤ Sub Kegiatan Pengiriman Pelatihan Ketrampilan Cacat yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi.	20,000,000	17,300,000	86.50
Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo			
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Penghuni Panti Asuhan / Jompo. ➤ Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Lansia 6 Desa (Kalibaruwetan, Kalibarukulon, Kalibarumanis, Kajarharjo, Banyuwangi dan Kebonrejo) Kalibaru.	60,000,000	53,542,400	89.24
➤ Sub Kegiatan Pelatihan Ketrampilan bagi Penghuni Panti Sosial dan Orang - Orang Lansia di Kecamatan Glenmore.	20,000,000	19,999,400	100
Kegiatan Bantuan Permakanan Bagi Penghuni Panti ➤ Sub Kegiatan Pemberian Permakanan pada Panti Asuhan di Banyuwangi	65,000,000	64,929,800	99.89
➤ Sub Kegiatan Bantuan Permakanan bagi Penghuni YKPTI Banyuwangi	130,000,000	129,704,500	99.77
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)			
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial ➤ Sub Kegiatan Pelatihan bagi eks Poenghuni Lokalisasi	126,276,520	103,900,650	82.28
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. ➤ Sub Kegiatan Pemantauan Kemajuan Perubahan Kondisi Lokalisasi di Kab. Banyuwangi.	20,000,000	13,301,350	66.51
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			
Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat ➤ Sub Kegiatan Pengiriman Peserta Pendidikan dan Pelatihan Bagi Peserta Penyandang PMKS	15,000,000	10,417,000	69.45
➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Manajemen Kualitas SDM bagi TKSK.	67,375,000	64,686,070	96.01
Program Pengelolaan Areal Pemakaman			
Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman ➤ Sub Kegiatan Pemeliharaan TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom	112,280,680	97,076,525	86.46
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja			
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja ➤ Sub Kegiatan Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Otomotif.	70,000,000	38,648,850	55.21

➤ Sub Kegiatan Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Las.	70,000,000	38,620,050	55.17
➤ Sub Kegiatan Pelatihan Bahasa Asing bagi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri.	75,000,000	74,802,764	99.74
Program Peningkatan Kesempatan Kerja			
Kegiatan Penyusunan Informasi Bursa Tenaga Kerja			
➤ Sub Kegiatan Fasilitas Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Pemerintah (BKP)	50,000,000	31,655,700	63.31
➤ Sub Kegiatan Job Market Fair (Bursa Kerja Terbuka)	121,018,800	117,554,800	97.14
➤ Sub Kegiatan Forum DIASPORA Banyuwangi.	50,000,000	44,818,990	89.64
➤ Sub Kegiatan Pendataan pencari kerja	36,802,000	27,352,780	74.32
Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Produktivitas dan Pelatihan Kewirausahaan.			
➤ Sub Kegiatan Pembinaan Kelompok Mantan TKI	52,997,000	40,409,000	76.25
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan			
Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial			
➤ Sub Kegiatan Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	105,000,000	103,739,500	98.80
Kegiatan Fasilitas Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan			
➤ Sub Kegiatan Penetapan Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	220,000,000	219,159,700	99.62
Kegiatan Sosialisasi berbagai Peraturan Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan			
➤ Sub Kegiatan Sosialisasi Penetapan dan Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	20,000,000	7,899,100	89.50
➤ Sub Kegiatan Fasilitas Penempatan TKI	30,000,000	12,339,850	41.13
Kegiatan Peningkatan Pengawasan, Perlindungan dan Penegakkan Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja.			
➤ Sub Kegiatan Penguatan dan Pembentukan SMK3 (Sistem Manajemen K3)	30,000,000	29,468,700	98.23
Pengembangan Hubungan Industrial yang Harmonis, Dialogis, Adil dan Bermartabat serta Perbaikan Upah, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja / Buruh.			
➤ Sub Kegiatan Pembinaan Pembentukan Sarana Hubungan Industrial (PP, PKB, LKS Bipartit dan Jamsostek).	60,000,000	55,689,100	92.82
Kegiatan Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing			
➤ Sub Kegiatan Penanganan Permasalahan dan Penempatan TKI.	50,000,000	30,431,450	60.86
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi			
Kegiatan Peningkatan Kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	95,000,000	94,998,600	100.00
Kegiatan Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM.	90,000,000	89,822,600	99.80
Program Transmigrasi Lokal			
Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Lokal	46,500,000	46,358,900	99.70
Program Transmigrasi Regional			
Kegiatan Pelatihan Transmigrasi Regional	100,000,000	99,321,600	99.32

KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP.

Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2014

DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP
Jabatan : Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si
Jabatan : Bupati Banyuwangi

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Banyuwangi, Januari 2015

Pihak kedua,

BUPATI BANYUWANGI

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2104

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi

	Sasaran Strategis	IKK	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kualitas Hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya Persentase PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial Tingkat penurunan PMKS	% % % %	80 75 45 20
2	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat pengangguran terbuka Rasio daya serap tenaga kerja Tingkat partisipasi angkatan kerja Pencari kerja yang ditempatkan Transmigrasi Swakarsa (Transmigrasi Umum, TSM, TU) Jumlah transmigrasi yang ditempatkan Peningkatan kualitas SDM Jumlah lokasi penempatan transmigrasi	% % % % % KK % Lokasi	4,59 4,37 99,2 20,40 11,85 30 31,62 5
3	Meningkatnya Jaminan dan Perlindungan Sosial Masyarakat	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi Persentase penduduk yang mempunyai jaminan sosial	% %	95 17
4	Menurunnya Kasus Sengketa Pengelola dengan Pekerja dan Kecelakaan Kerja	Persentase perselisihan buruh dan pengusaha yang dapat diselesaikan Keselamatan dan perlindungan kerja	% %	14 87,57

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
dan Transmigrasi
Kabupaten Banyuwangi

Drs. S. ALAM SUDRAJAT. M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008

<u>Program</u>	<u>Anggaran</u>	<u>Keterangan</u>
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 664.268.000,-	APBD
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 283.482.000,-	APBD
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 45.000.000,-	APBD
4. Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Rp. 175.000.000,-	APBD
5. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.	Rp. 220.000.000,-	APBD
6. Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Rp. 70.000.000,-	APBD
7. Pembinaan Panti Asuhan/Jompo	Rp. 275.000.000,-	APBD
8. Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	Rp. 146.276.520,-	APBD
9. Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Rp. 82.375.000,-	APBD
10. Pengelolaan Area Pemakaman	Rp. 112.280.680,-	APBD
11. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp. 215.000.000,-	APBD
12. Peningkatan Kesempatan Kerja	Rp. 310.817.800,-	APBD
13. Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Rp. 515.000.000,-	APBD
14. Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Rp. 185.000.000,-	APBD
15. Transmigrasi Lokal	Rp. 46.500.000,-	APBD
16. Transmigrasi Regional	Rp. 100.000.000,-	APBD

BUPATI BANYUWANGI

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si.

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008

5. AKUNTABILITAS KEUANGAN

1. Pagu anggaran Tahun 2014 sebesar Rp 6.505.589.740,00 (Enam Milyar limaratus lima Juta Limaratus Ratus delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus empatpuluh Rupiah), dengan rincian :

- Belanja pegawai	Rp.	3.884.839.140,00
- Belanja barang / jasa	Rp.	2.454.000.600,00
- Belanja modal	Rp.	166.750.000,00.

2. Realisasi pada per 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp. 5.992.808.679,00 (Lima Milyar Sembilan Ratus sembilan Puluh dua Juta delapan Ratus delapan Ribu enam Ratus tujuhPuluh sembilan Rupiah) atau 92,11% dari pagu anggaran, dengan rincian :

- Belanja pegawai	Rp.	3.635.735.779,00	(93,58%)
- Belanja barang / jasa	Rp.	2.191.723.900,00	(89,31%)
- Belanja modal	Rp.	165.349.000,00	(99,15%)

Penjelasan realisasi belanja program dapat diilustrasikan dalam table berikut:

Tabel: Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2014

	Program	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	664.268.000	616.738.016	92,84%
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	283.482.000	278.998.800	98,41%
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	45.000.000	44.487.150	98,86%
	Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT Dan PMKS lainnya	175.000.000	137.082.135	78,33%
	Pelayanan dan Rehabiltasi Kesejahteraan Sosial	220.000.000	193.700.120	88,04%
	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	70.000.000	62.776.450	89,68%
	Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo	275.000.000	268.176.100	97,51%
	Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Napi, Narkoba dan eks Penyandang Penyakit Sosial Lainnya)	146.276.520	117.202.000	80,12%
	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	82.375.000	75.103.070	91,17%
	Pengelolaan Areal Pemakaman	112.280.680	97.076.525	86,45%
	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.000.000	152.071.664	70,73%
	Peningkatan Kesempatan Kerja	310.817.800	261.791.270	84,22%
	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	515.000.000	468.727.400	91,01%
	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	185.000.000	184.821.200	99,90%
	Transmigrasi Lokal	46.500.000	46.358.900	99,69%
	Transmigrasi Regional	100.000.000	99.321.600	99,32%

Tabel Realisasi Anggaran per 31 Desember 2014

	Uraian	Anggaran	Realisasi	
			Anggaran	%
	Realisasi Pendapatan Daerah (bila ada)	Rp. -	Rp. -	-
	-Penerimaan Pajak	Rp. -	Rp. -	-
	-Penerimaan Daerah Bukan Pajak	Rp. -	Rp. -	-
	-Penerimaan Hibah	Rp.	Rp. -	-
	Realisasi Belanja Daerah	Rp. 6.505.589.740,	Rp. 5.992.808.679	81,29%
	A. Rupiah Murni			
	-Belanja Pegawai	Rp 3.884.839.140,	Rp 3.635.735.779	77,71%
	-Belanja Barang /Jasa	Rp. 2.454.000.600	Rp. 2.191.723.900	82,41%
	-Belanja Modal	Rp, 166.750.000	Rp. 165.349.000	63,64%
	B. Pinjaman dan Hibah (bila ada)	Rp. -	Rp.	-
	-Belanja Barang		-	

Penjelasan per pos dari realisasi anggaran

1. Realisasi Pendapatan Daerah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi nihil (kosong)
2. Realisasi Belanja Daerah dari yang ditargetkan sebesar Rp. 6.505.589.740,00 pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp 5.992.808.679,00 atau 92,11% artinya sudah mencerminkan 3e (ekonomis, efektif dan efisien) yang terdiri dari:
 - a. Belanja Pegawai ditargetkan sebesar Rp. 3.884.839.140,00 pada tahun 2014 terealisasi sebesar Rp. 3.635.735.779,00 atau 93,58% artinya bahwa kinerja keuangan mencerminkan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien benar-benar dilakukan pada setiap kegiatan dengan mempertimbangkan *money follow function*.
 - b. Belanja Barang dan Jasa ditargetkan sebesar Rp. . 2.454.000.600,00 terealisasi sebesar Rp. 2.191.723.900,00 atau 89,31%, artinya bahwa kinerja keuangan telah mencerminkan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien) dengan mempertimbangkan *money follow function*.
 - c. Sedangkan untuk belanja modal dianggarkan sebesar Rp. 166.750.000,00 terealisasi sebesar Rp. 165.349.000,00 atau sekitar 99,15%. Hal ini mencerminkan kinerja keuangan cukup baik karena kegiatan dapat dicover dengan peralatan yang lain dengan tidak mengesampingkan kebutuhan realistis kegiatan.
3. Realisasi Pinjaman dan Hibah pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi nihil (kosong).

- **Beberapa faktor tercapainya penyerapan atau rendahnya penyerapan**

Pada tahun 2014 kinerja keuangan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi masih dalam keadaan baik karena prosentase rata-rata seluruh belanja sebesar 92,11% artinya bahwa setiap program/ kegiatan tingkat penyerapannya sudah baik dan mencerminkan kinerja keuangan yang baik pula. Hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

1. Program/ kegiatan sudah tersusun, terjadual dengan baik sesuai dengan yang direncanakan;
2. Setiap proses dalam rangka pelaksanaan kegiatan terpantau dengan baik artinya bahwa sistem pengendalian internal (SPI) berjalan aktif dan efektif memantau setiap jengkal proses pelaksanaan kegiatan.
3. Hubungan internal terjalin harmonis, sinergi, koordinatif dan sinkronitatif.

- **Catatan Penting lainnya**

Pada Tahun 2014, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan transmigrasi Kabupaten Banyuwangi tidak mempunyai catatan penting yang mesti disampaikan namun bukan berarti tanpa goresan seperti sebuah kertas putih polos tapi lebih kepada bagaimana dinas bahu membahu dengan keterbatasan kuantitas SDM yang dimiliki melaksanakan kegiatan dalam tahun ini. Semoga kinerja pada tahun berikutnya akan semakin meningkat dan memberikan kontribusi yang optimal terhadap program sesuai dengan harapan bersama.

BAB IV

PENUTUP

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi secara fungsi sangat erat terkait dengan program dan sasaran baik mulai dari tingkat Pusat, Provinsi sampai daerah, artinya bahwa setiap program kegiatan mempunyai benang merah mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah (*sustainable programme*). Adapun program/ kegiatan dimaksud adalah terkait dengan pemberantasan kemiskinan, menurunkan tingkat pengangguran yang merupakan program dalam skala prioritas di tingkat pusat, regional.

Pada tahun 2014 banyak hal sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi dalam menopang sasaran prioritas RPJMD Kabupaten Banyuwangi utamanya. Hal ini tercermin dari kinerja yang dihasilkan (92,11%) dan ditunjang pula oleh kinerja keuangan yang baik dengan menggunakan prinsip 3e (ekonomis, efektif dan efisien dengan mempertimbangkan azas *money follow function*. Kontribusi yang diberikan untuk mengentaskan kemiskinan dan menurunkan tingkat pengangguran signifikan dengan program/ kegiatan yang ada dan dilaksanakan dengan baik oleh dinas. Keberhasilan program/ kegiatan yang ada tak lepas dari aspek koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas baik internal dan eksternal.

A. Kesimpulan

Dari uraian pengukuran kinerja dan analisa kinerja diatas dapat disimpulkan akan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2014 telah melaksanakan segala kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2014 dengan kinerja yang terukur, terarah yaitu rata-rata kegiatan telah dilaksanakan seluruhnya dengan output yang maksimal.
2. Kinerja bidang sosial, tenaga kerja, hubungan industrial dan transmigrasi pada tahun 2014 ini menunjukkan sangat baik dibandingkan dengan tahun 2013, artinya semakin tahun semakin menunjukkan peningkatan kinerja yang semakin baik.
3. Optimalisasi SDM yang berada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi meski dengan keterbatasan kuantitas bersama dengan *stakeholder* secara koordinatif, integratif, sinkronitatif dan sinergitas telah menunjukkan kinerja yang meningkat pula.
4. Peningkatan kinerja pada tahun ini yang secara signifikan telah berhasil menopang sasaran dalam RPJMD Kabupaten Banyuwangi yang telah ditetapkan.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi mempunyai saran dalam upaya meningkatkan kinerja pada tahun- tahun berikutnya, adalah:

1. Dengan keterbatasan kuantitas SDM yang ada, maka diperlukan tambahan personil untuk menunjang dan lebih meningkatkan pelayanan kepada public dan kegiatan sesuai dengan tupoksi dinas.
2. Penanganan masalah pada bidang social, tenaga kerja dan transmigrasi perlu adanya penambahan gedung/lokal untuk menampung para PMKS dan Transmigran dan pencari kerja sehingga mereka yang berada pada dibawah garis marjinal mendapatkan pelayanan yang maksimal.
3. Dalam rangka menekan jumlah pengangguran atau pencari kerja kegiatan pameran bursa kerja tetap dilaksanakan, karena berfungsi sebagai wadah instan lapangan kerja dan sangat efektif karena langsung merekrut para pencari kerja dengan spesifik persyaratan yang diperlukan oleh perusahaan.
4. Diperlukan tempat pelatihan atau Balai Latihan Kerja (BLK) di Banyuwangi untuk mendidik dan melatih para angkatan kerja dalam memperoleh pengetahuan sebagai daya saing untuk memperebutkan lapangan kerja yang ditawarkan sehingga tidak perlu jauh dalam memperoleh pengetahuan/ ketrampilan.

Banyuwangi,
KEPALA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP

Pembina Utama Muda

NIP. 19611029 199103 1 008

PENETAPAN KINERJA TAHUN 2014

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).	Jumlah Wanita Rawan Sosial Ekonomi yang dilatih	orang	20	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	175.000.000
	Jumlah Orgil dan gepeng yang di tangani	orang	85%	1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	40.000.000
	Jumlah eks narapidana yang mengikuti latihan ketrampilan	orang	10	2. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS lainnya	40.000.000
	Jumlah pelaksana PKH yang mengikuti rakor dan Bimtek	orang	65	3. Fasilitasi Manajemen usaha bagi Keluarga miskin(pertemuan rakor dan bimtek bagi Tim Pelaksana PKH)	75.000.000
	Jumlah WRSE yang diberi bimbingan ketrampilan usaha beternakkambing	orang	50	4. Pelaksanaan Keterampilan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial - Pelatihan ketrampilan bagi wanita rawan Sosial Ekonomi (WRSE) dan lansia produktif	20.000.000
Mengoptimalkan potensi sumber kesejahteraan sosial	Jumlah lembaga/ petugas kesejahteraan social			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	220.000.000
	Jumlah SDM Tenaga kesejahteraan Sosial yang berbasis Masyarakat	orang	50	1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye social bagi PKMS - Sosialisasi tentang Rehabilitasi berbasis Masyarakat.	20.000.000
	Memberdayakan anak-anak yang terlantar termasuk anjal, anak nakal dan anak cacat	Orang	15	2. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anjal, anak cacat dan anak nakal: - Pelatiham menyablon anak putus sekolah	50.000.000
	Jumlah Anggota TAGANA yang ditingkatkan kualitas kerjanya. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan	Orang Orang	39 144	3. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa - Peningkatan kesejahteraan dan Pemantapan TAGANA - Pemulangan orang terlantar (kehabisan bekal, kehilangan dan kecapetan)	150.000.000
Meningkatkan pembinaan Para Penyandang Cacat	Jumlah penderita yang diikuti pelatihan	Orang	15	Program Pembinaan para penyandang cacat dan eks trauma	70.000.000
				Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma. - Pelatihan menyablon bagi penderita cacat dan eks trauma	50.000.000
	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan ketrampilan	orang	25	Pendayagunaan paa penyandang cacat dan eks trauma - Pengiriman pelatihan ketrampilan cacat yang diselenggarakan Dinas Sosial Provinsi	20.000.000
				Program pembinaan Panti Asuhan/ pati Jompo	275.000.000
	Jumlah Para Lansia yang dibina untuk meningkatkan pendapatan	Orang	60	1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni panti Asuhan/jompo. - Pembinaan dan pemberdayaan Lansia pada 6 Desa di kec. Kalibaru. - Pelatihan ketrampilan bagi penghuni panti social dan orang-orang lansia di kec. Glenmore.	80.000.000
	Jumlah para penghuni panti yang mendapatkan bantuan permakanan	Orang Panti Panti	25 50 1	2. Bantuan Permakanan bagi penghuni panti - Pemberian permakanan pada panti asuhan di Banyuwangi. - Bantuan permakanan bagi penghuni YKPTI Banyuwangi	65.000.000
					130.000.000
Peningkatan pemantauan eks lokalisasi di Kab. Banyuwangi	Jumlah lokalisasi yang di pantau perkembangannya.	Lokasi	11	Program Pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, psk, narkoba dan penyakit lainnya). 1. Monitoring Evaluasi dan pelaporan	20.000.000
	Jumlah Penyandang cacat dan eks trauma yang baru dikirim dan dilatih;	Orang Orang	24 20	Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 1. Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial. - Fasilitasi manajemen kualitas SDM bagi TKSK - Pengiriman Peserta Pendidikan dan pelatihan bagi peserta penyandang PMKS	82.375.000
Melestarikan nilai-nilai kepahlawanan.	Jumlah TMP yg dipelihara			Program Pengelolaan Areal Pemakaman	65.606.200
	Jumlah TMP yang dipelihara	lokasi	2	1. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman (Pemeliharaan di TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom)	65.606.200
Memperluas lapangan kerja & penanganan pengangguran melalui penempatan sektor formal dan informal.	jumlah Tenaga kerja yang di latih dibidang Otomotif	Orang	20	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	215.000.000
	jumlah Tenaga kerja yang di latih dibidang Las	Orang	20	1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja. - Pelatihan berbasis Kompetensi bidang Perbengkelan Otomotif - Pelatihan Kerja berbasis Kompetensi Bidang Perbengkelan Las	70.000.000 70.000.000
	Jumlah TKI yang di latih berbahasa Asing	Orang	20	- Pelatihan Bahasa Asing bagi Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri	75.000.000

Meningkatkan kualitas dan penurunan angka pengangguran				Program Peningkatan Kesempatan Kerja	311.018.800
	Jumlah pencari kerja yang mendaftar	orang	100	1. Penyusunan informasi bursa tenaga Kerja - Fasilitas Bursa Kerja Khusus (BKK) dan Bursa Kerja Pemerintah (BKP)	50.000.000
	Terbentuknya perda penempatan dan perlindungan TKI	% Regulasi	85 1	2. Penyebarluasan Informasi bursa tenaga kerja. - Job Market Fair (Bursa Kerja terbuka)	121.018.800
	Jumlah mantan TKI yang mendapatkan pembinaan	Orang	50	- Forum DIASPORA Banyuwangi - Penyusunan perda Penempatan dan perlindungan TKI	50.000.000
Menciptakan hubungan industrial yang efektif dan harmonis serta menciptakan iklim kerja yang kondusif dan produktif.	Prosentase jumlah Kasus Tenaga Kerja di perusahaan dan Tenaga Kerja Indonesia di luar Negeri dan Tenaga Kerja Asing	%	85	3. Penfembangan Kelembagaan Produktivitas dan pelatihan kewirausahaan - Pembinaan kelompok manta TKI	40.000.000
	Prosentasi jumlah penanganan permasalahan dan penempatan TKI	%	85	Program Pelindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	80.000.000
Memberdayakan pelaksanaan norma kerja dan norma keselamatan & kesehatan kerja.	Prosentase peningkatan pelaksanaan K3 di perusahaan yang ada	%	85	1. Penanganan Kasus Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri dan Tenaga kerja Asing. - Penanganan masalah Penempatan TKI	50.000.000
	Prosentase lembaga yang telah dibina dan yang belum	%	80	2. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan. - Fasilitas Penempatan TKI	30.000.000
		Perusahaan	80	Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	435.000.000
		Persh	8	1. Fasilitas Penyelesaian Prosedur, Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial - Penyelesaian kasus Perselisihan hubungan Industrial	105.000.000
		%	85	2. Fasilitas Penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan Sosial Ketenagakerjaan - Penetapan upah Minimum kabupaten (UMK)	220.000.000
			100	3. Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan - Sosialisasi Penetapan dan Penerapan Upah Minimum Kabupaten (UMK)	20.000.000
			40	4. Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja - Penguatan dan Pembentukan SMK3 (Sistem Manajemen K3)	30.000.000
			85	5. Pengembangan Hubungan Industrial yang harmonis, dialogis, Adil dan bermartabat serta perbaikan Upah, Syarat kerja dan Kesejahteraan pekerja/buruh. - Pembinaan dan Pembentukan sarana hubungan Industrial (PP,PKB, LKS, Bipartit dan Jamsostek)	60.000.000
Mewujudkan kerja sama antar daerah bidang transmigrasi.	Meningkatkan jalinan kerjasama antar daerah dalam bidang transmigrasi			Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	200.000.000
	Jumlah lokasi yang akan dijadikan daerah tujuan transmigrasi	Lokasi	6	1. Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka Pengembangan Kawasan Transmigrasi	60.000.000
Melaksanakan pemberangkatan dan penempatan transmigrasi.	Jumlah calon transmigran yang diberangkatkan ; Jumlah pendaftar transmigrasi	KK	40	1. Pengerahan dan Fasilitas Perpindahan serta Penempatan Transmigrasi untuk memenuhi Kebutuhan SDM (Pendaftaran, Seleksi, Sosialisasi, Bantuan, Pemberangkatan, Pengawasan/Penempatan)	90.000.000
	Jumlah calon transmigran yang dilatih	orang	40	Program Transmigrasi Regional Pelatihan transmigrasi regional	50.000.000

SKPD : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banyuwangi
Tahun Anggaran : 2014

Banyuwangi, Januari 2014

Pihak Kedua

Pihak Pertama

BUPATI BANYUWANGI

Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Dan Transmigrasi Kab. Banyuwangi

H. ABDULLAH AZWAR ANAS, M.Si

Drs. S. ALAM SUDRAJAT, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19611029 199103 1 008

